

FAKTOR-FAKTOR PENGARUH EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SEKOLAH
Studi Kasus SMK PGRI Klungkung

Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama
dan
Ni Ketut Ari Utami

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta
bimawikrama65@gmail.com

Abstrak - Dunia pendidikan formal, menjadi salah satu faktor dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas, dan menjadi syarat mutlak untuk menciptakan kerja dan hasil kerja yang berkualitas. Banyak faktor yang berpengaruh dalam proses pendidikan. Salah satunya yang paling menentukan adalah kebijakan sekolah. Kebijakan sekolah akan sangat tergantung terhadap peranan seorang guru sebagai seorang pendidik dalam menjalankan aktivitas pendidikan dan pengawasan dari sistem kebijakan sekolah untuk menghasilkan kinerja pendidikan yang baik dan berkualitas. Guru yang berkualitas dan menunjukkan kinerja yang efektif akan sangat mempengaruhi kinerja pendidikan itu sendiri. Hal ini juga yang semestinya berlaku dan berjalan di SMK PGRI Klungkung.

Penelitian ini memfokuskan diri pada Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Kebijakan Sekolah. Metode penelitian dilakukan dengan deskripsi kualitatif yang dipadukan dengan kuantitatif serta analisis data menggunakan deskriptif naratif, yaitu reduksi data, penyajian data dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat delapan faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan sekolah. Oleh karena itu efektifitas kebijakan sekolah dalam peningkatan kinerja pendidikan di SMK PGRI Klungkung memiliki katagori sangat baik dilihat dari sistem perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan evaluasi.

Kata kunci: efektivitas kebijakan, kinerja pendidikan dan guru.

Abstract - The world of formal education is one of the factors in producing quality human resources (HR), and is an absolute requirement for creating quality work and results. Many factors influence the educational process. One of the most decisive is school policy. School policy will greatly depend on the role of a teacher as an educator in carrying out educational activities and supervision of the school policy system to produce good and quality educational performance. Teachers who are qualified and show effective performance will greatly affect the performance of education itself. This is also what should apply and run at SMK PGRI Klungkung.

This study focuses on the Factors Influencing the Effectiveness of School Policies. The research method was carried out with qualitative descriptions combined with quantitative and data analysis using descriptive narratives, namely data reduction, data presentation and triangulation.

The results of the study indicate that there are eight factors that influence the effectiveness of school policies. Therefore, the effectiveness of school policies in improving

educational performance at SMK PGRI Klungkung has a very good category in terms of planning, management, reporting and evaluation systems.

Keywords: *policy effektiveness, education and teachers performance.*

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan, dalam hal ini pendidikan formal, memang menjadi salah satu faktor sangat penting dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berkualitas menjadi syarat mutlak untuk melahirkan kerja dan hasil kerja yang berkualitas. Kinerja yang berkualitas dan sesuai standar yang telah ditentukan, akan memberi nilai positif bagi organisasi atau lembaga bersangkutan termasuk orang-orang yang terlibat didalamnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Klungkung adalah salah satu institusi pendidikan formal tingkat menengah yang ada di Kabupaten Klungkung. Kehadirannya di Kabupaten Klungkung sudah barang tentu sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan pendidikan bagi anak-anak mereka, khususnya yang terkait dengan kejuruan jasa perhotelan, tata boga dan komputer. Ketiga jenis kejuruan tersebut sangat diperlukan di pasar tenaga kerja khususnya di Bali yang tidak terlepas dari kehidupan

pariwisata. Pada sisi lain, Pemerintah juga terbantu dalam mengemban tanggung jawab pendidikan bagi warga negaranya dan menyiapkan SDM andal dalam memasuki pasar kerja dibidang pariwisata.

Dalam proses pendidikan, luaran yang diharapkan adalah SDM yang andal dan berkualitas. Dalam konteks demikian, kebijakan sekolah dan peran tenaga kependidikan, khususnya guru sangat penting. Guru yang berkualitas dan menunjukkan kinerja yang efektif akan sangat mempengaruhi kinerja pendidikan itu sendiri. Hal ini juga yang semestinya berlaku dan berjalan di SMK PGRI Klungkung.

RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari paparan latar belakang dan teori yang telah penulis kemukakan, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan sekolah?

KAJIAN PUSTAKA

Teori utama (*grand theory*) yang penulis gunakan untuk mendasari kajian tentang “Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektifitas Kebijakan Sekolah” adalah teori motivasi dan teori manajemen. Kedua teori tersebut kemudian dipakai oleh banyak sarjana untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial, politik, ekonomi, manajemen sumber daya manusia, termasuk dibidang pendidikan, khususnya manajemen pendidikan (sekolah).

Sondang P. Siagian dalam bukunya *Manajemen Sumber Daya Manusia* (2003:

285-326) membahas secara cukup mendalam berkaitan dengan teori motivasi, dari teori motivasi Abraham H. Maslow sampai teori Imbalan-Prestasi. Dikatakan bahwa:

“...karena teori perilaku organisasional merupakan bagian dari teori manajemen sumber daya manusia, aspek-aspek motivasional dan kepuasan kerja perlu pula dibahas sebagai bagian teori manajemen sumber daya manusia sebagai keseluruhan. Artinya, pembahasan teori motivasi dan kepuasan kerja dalam rangka pemahaman teori keperilakuan bisa saja dilakukan lebih mendalam, sedangkan sebagai bagian di teori umum mengenai manajemen sumber daya manusia, pembahasan motivasi dan kepuasan kerja hanya bersifat sekilas.”

Teori motivasi pada dasarnya berangkat dari anggapan dasar bahwa setiap apa yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang didasarkan pada motif atau alasan tertentu. Atau keadaan dalam diri individu/kelompok individu, yang berupa dorongan (*drive*) yang menyebabkan individu/kelompok individu bersangkutan berbuat/berperilaku tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan (mencapai tujuan).

Mengaitkan teori motivasi dengan pendidikan dan penelitian, Harold F. O'Neil, Jr dan Michael Drillings (1994: 14) mengatakan:

(Variabel-variabel motivasi, seperti daya upaya, kegelisahan, rasa ingin tahu, memiliki peran signifikan terhadap kinerja pada semua tingkat pendidikan dan pelatihan. Variabel-variabel tersebut memengaruhi upaya, mempermudah manusia secara individual mewujudkan kompetensi-kompetensi baru mereka, kualitas hasil yang bisa dirumuskan dari

penilaian terhadap kegiatan pelatihan, kemungkinan individu mempraktikkan keterampilan yang didapatkan dari pelatihan pada bidang-bidang terkait, dan resistensi pengetahuan dan keterampilan terhadap degradasi di bawah kondisi stres dan perubahan-perubahan dan situasi yang tidak diantisipasi).

Jelaslah dari apa yang disampaikan oleh Sondang P. Siagian maupun O'Neil dan Drillings bahwa teori motivasi memegang peranan penting dalam bidang manajemen (sumber daya manusia) demikian juga di dunia pendidikan dan pelatihan. Sampai di sini, sebenarnya setiap organisasi atau lembaga yang di dalamnya menghadirkan kerja bersama sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan, maka teori motivasi menjadi penting.

a. Pengertian Efektivitas

Menurut KBBI *Online* (<https://kbbi.web.id/efektivitas>), efektivitas yang berarti keefektifan. Sementara efektif sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 219) berarti berhasil, berguna. Dengan demikian efektivitas juga berarti keberhasilan, kebergunaan. Sementara, menurut E. Mulyasa (2000), efektivitas merujuk pada situasi adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa efektivitas adalah sesuatu yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, tewujudnya suatu hasil dari suatu upaya, usaha, kegiatan. Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut mencapai tujuan ideal yang telah ditentukan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditentukan. Hasil yang

mendekati sasaran berarti tinggi tingkat efektivitasnya. Sebaliknya, hasil yang jauh dari sasaran maka kurang efektivitasnya.

b. Pengertian Kebijakan

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana dikutip dalam buku Administrasi Pendidikan Kontemporer karya Syaiful Syagala, 2008 diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen atau pelaksana operasional dalam mencapai sasaran.

Caldwell dan Spinks merekomendasikan satu model dari formulasi kebijakan berdasarkan kepada apakah isu kepuasan umum terhadap praktik yang ada di sekolah (*non contentious*), dan didasarkan kepada adanya ketidaksetujuan atas praktik yang berlangsung diantara staf atau yang lain dikalangan warga sekolah. Selain itu ada ketidakpuasan tentang pendekatan yang diambil jika isu itu tidak diupayakan di sekolah. Bagi pembuatan kebijakan yang berdasarkan kepada keadaan isu ketidaksetujuan, disarankan bahwa kesepakatan dari kelompok kerja mempersiapkan pilihan-pilihan bagi pertimbangan oleh format kebijakan. Kelompok kerja seharusnya terwakili dari sejumlah ahli dan memahami isu dan kebijakan yang harus memperoleh informasi dari berbagai macam sumber dalam mempersiapkan pilihan kebijakan. Hasil yang diinginkan adalah adanya konsensus atas suatu

kebijakan yang diingkan dan layak. Pendekatan yang disarankan memberikan mekanisme pemberdayaan staf dan warga sekolah dalam mempersiapkan kebijakan yang memberikan kerangka kerja bagitindakan dalam membawa visi menjadi realitas.

Efektivitas Kebijakan sekolah pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan sekolah. Artinya, kebijakan sekolah adalah seperangkat tindakan sekolah yang didesain untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu yang diharapkan oleh publik atau masyarakat sebagai konstituen sekolah. Sebuah kebijakan tanpa tujuan tidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan menimbulkan masalah baru. Efektivitas pembuatan kebijakan sekolah adalah kesamaan dan penerimaan dari sasaran pada semua level untuk meningkatkan peluang pencapaian sasaran organisasi dan tidak menghamburkan energi dalam konflik.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menekankan pada perpaduan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan sekolah. Untuk memudahkan dalam pendataan dan analisis, maka peneliti melakukan tahapan pengambilan data dengan menyiapkan seluruh instrumen yang dibutuhkan.

DATA PENELITIAN EFEKTIFITAS KEBIJAKAN SEKOLAH

1. Rekapitulasi Nilai Faktor Standar Isi

Komponen standar isi dari kebijakan sekolah terdiri dari sembilan item pertanyaan dengan bobot 10, dapat disajikan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.Rekapitulasi Nilai Faktor Standar Isi

No	Komponen	Jumlah Skor Jawaban	Rata – rata Skor jawaban	Bobot Nilai
1	Sikap Spiritual	556	4.00	1.00
2	Sikap Sosial	482	3.46	0.87
3	Pengetahuan	498	3.58	0.89
4	Ketrampilan	485	3.48	0.87
5	Keahlian	485	3.48	0.87
6	Pengawasan	357	2.68	0.67
7	Pengorganisasian	464	3.33	0.83
8	Standar Operasional	427	3.07	0.77
9	Pengembangan Diri	480	3.45	0.86
Jumlah				7.63

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel 1 tentang nilai faktor standar isi, menjelaskan bahwa komponen sikap spiritual memiliki bobot nilai 1,00 yang bermakna sangat baik terhadap kebijakan sekolah yang ditetapkan. selain itu komponen sikap sosial, pengetahuan, ketrampilan, keahlian, pengorganisasian dan pengembangan diri, memiliki katagori baik dari kebijakan sekolah. Sedangkan komponen pengawasan masih kurang terhadap kebijakan sekolah yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena tingkat kehadiran guru tidak memenuhi jam

kerja normal. Secara kumulatif bobot nilai standar isi ditetapkan 10 dan hasil penilaian diperoleh sebesar 7,63 sehingga memiliki pengaruh baik dan bermakna terhadap kebijakan sekolah, yang berarti kebijakan sekolah akan dapat dilaksanakan dengan baik dalam menunjang kegiatan belajar dan mengajar.

2. Rekapitulasi Nilai Faktor Standar Proses

Faktor standar proses dari kebijakan sekolah terdiri dari delapan belas item pertanyaan dengan bobot 15, dapat disajikan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.Rekapitulasi Nilai Faktor Standar Proses

No	Komponen	Jumlah Skor Jawaban	Rata – rata Skor jawaban	Bobot Nilai
1	Silabus	467	3.3597	0.840
2	RPP	477	3.4317	0.858
3	Ketersediaan SDM	481	3.4604	0.865
4	Jumlah siswa didik	453	3.2590	0.815
5	Ketersediaan buku	461	3.3165	0.829
6	Pengelolaan kelas	477	3.4317	0.858
7	Kesiapan guru	451	3.2446	0.811
8	Strategi pembelajaran	479	3.4460	0.862
9	Metode pembelajaran	499	3.5899	0.897
10	Media pembelajaran	459	3.3022	0.826

11	Sumber pembelajaran	479	3.4460	0.862
12	Pendekatan pembelajaran	454	3.2662	0.817
13	Penilaian otentik	448	3.2230	0.806
14	Pengawasan obyektif	453	3.2590	0.815
15	Tindakan supervise	435	3.1295	0.782
16	Tindakan pemantauan	462	3.3237	0.831
17	Penilaian dan evaluasi	449	3.2302	0.808
18	Pelaporan	379	2.7266	0.682
Jumlah				14.861

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel 2 tentang faktor standar proses di atas dapat dijelaskan, bahwa dari 18 item pertanyaan yang menjadi komponen standar proses, 17 instrumen memiliki katagori baik dan memiliki pengaruh bermakna terhadap kebijakan sekolah yang direncanakan. Sedangkan katagori pelaporan memiliki bobot nilai 0,682, yang menyatakan bahwa proses pelaporan dalam kegiatan belajar mengajar masih kurang, yang tentunya akan berpengaruh terhadap kegiatan evaluasi yang harus dilakukan, khususnya dalam peningkatan kegiatan belajar mengajar.

Secara akumulatif bobot nilai standar proses ditetapkan sebesar 15, dan hasil penelitian menunjukkan akumulasi

bobot standar proses dihasilkan sebesar 14,861 dengan katagori sangat baik dan memiliki pengaruh bermakna terhadap kebijakan sekolah untuk dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

3. Rekapitulasi Nilai Faktor Standar Kelulusan

Faktor standar kelulusan dari kebijakan sekolah merupakan standar kompetensi kelulusan yang terdiri kompetensi ketaqwaan, sikap sosial, sikap pembelajar, sehat jasmani dan rohani, memiliki sikap faktual, ketrampilan, serta sikap kemandirian, dengan bobot nilai sebesar 12. Hasil nilai komponen standar kelulusan dapat disajikan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.Rekapitulasi Nilai Komponen Standar Kelulusan

No	Komponen	Jumlah Skor Jawaban	Rata – rata Skor jawaban	Bobot Nilai
1	Beriman dan bertaqwa	488	3.5108	0.878
2	Memiliki sikap sosial	494	3.5540	0.888
3	Memiliki sikap pembelajar	461	3.3165	0.829
4	Sehat jasmani dan rohani	476	3.4245	0.856
5	Besikap faktual	478	3.4388	0.860
6	Memiliki ketrampilan	455	3.2734	0.818
7	Memiliki Kemandirian	491	3.5324	0.883
Jumlah				6.013

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel 3 tentang faktor standar kelulusan yang terdiri dari tujuh komponen, memiliki katagori baik terhadap kebijakan sekolah. Dari akumulai nilai bobot yang

dihasilkan standar kelulusan yaitu sebesar 6,013 masih kurang dari bobot nilai yang ditetapkan, sehingga komponen standar kelulusan yang ditetapkan melalui

kebijakan sekolah memerlukan evaluasi atau peningkatan dalam pengawasan.

4. Rekapitulasi Nilai Faktor Standar Pendidik dan Kependidikan

Faktor standar pendidik dan tenaga kependidikan dari kebijakan sekolah terdiri dari delapan belas item pertanyaan dengan bobot 16, dapat disajikan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4. Rekapitulasi Nilai Komponen Standar Pendidik dan Kependidikan

No	Komponen	Jumlah Skor Jawaban	Rata – rata Skor jawaban	Bobot Nilai
1	Memiliki kualifikasi akademik	556	4.0000	1.000
2	Memiliki sertifikat pendidik	484	3.4820	0.871
3	Memiliki sertifikat kompetensi	452	3.2518	0.813
4	Memiliki kompetensi pedagogik	417	3.0000	0.750
5	Memiliki kompetensi professional	487	3.5036	0.876
6	Memiliki kompetensi kepribadian	473	3.4029	0.851
7	Memiliki kompetensi sosial	482	3.4676	0.867
8	Kompetensi profesional/BK	357	2.5683	0.642
9	Memiliki rasio BK : Siswa	467	3.3597	0.840
10	Pimpinan memiliki syarat akademik	482	3.4676	0.867
11	Pimpinan memiliki kemampuan manajerial	483	3.4748	0.869
12	Pimpinan memiliki kemampuan kewirausahaan	497	3.5755	0.894
13	Pimpinan memiliki kemampuan supervisi	486	3.4964	0.874
14	Memiliki tenaga adm kependidikan	486	3.4964	0.874
15	Memiliki kepala perpustakaan	338	2.4317	0.608
16	Memiliki kepala program keahlian	462	3.3237	0.831
17	Memiliki tenaga teknis dan perawatan	357	2.5683	0.642
18	Memiliki tenaga layanan khusus	357	2.5683	0.642
Jumlah				14.610

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel 4 tentang faktor pendidik dan kependidikan, menghasilkan nilai 14,610 dengan katagori sangat baik dan memiliki pengaruh dan bermakna terhadap kebijakan sekolah yang direncanakan. Sedangkan kompetensi professional untuk bimbingan dan konseling bagi siswa masih sangat kurang, hal ini akan menjadi kendala dalam pelaksanaan evaluasi terhadap siswa.

5. Rekapitulasi Nilai Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor standar sarana dan prasarana dari kebijakan sekolah terdiri dari dua puluh tujuh item pertanyaan dengan bobot 17. Penilaian faktor standar sarana dan prasarana dapat disajikan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 5.Rekapitulasi Nilai Faktor Sarana dan Prasarana

No	Komponen	Jumlah Skor Jawaban	Rata – rata Skor jawaban	Bobot Nilai
1	Luas lahan sekolah sesuai ketentuan	369	2.655	0.664
2	Lahan sekolah sesuai standar kesehatan yang ditentukan	377	2.712	0.678
3	Luas bangunan sesuai ketentuan	359	2.583	0.646
4	Bangunan sesuai standar keselamatan	373	2.683	0.671
5	Bangunan sesuai standar kesehatan	395	2.842	0.710
6	Bangunan didukung instalasi listrik	343	2.468	0.617
7	Pemeliharaan secara berkala	386	2.777	0.694
8	Memiliki ruang pembelajar umum	356	2.561	0.640
9	Memiliki ruang penunjang	362	2.604	0.651
10	Memiliki ruang pembelajar khusus	352	2.532	0.633
11	Memiliki ruang kelas sesuai standar	352	2.532	0.633
12	Memiliki ruang perpustakaan	349	2.511	0.628
13	Memiliki ruang kepala sekolah	381	2.741	0.685
14	Memiliki ruang guru	359	2.583	0.646
15	Memiliki ruang administrasi	343	2.468	0.617
16	Memiliki tempat ibadah	353	2.540	0.635
17	Memiliki ruang konseling	346	2.489	0.622
18	Memiliki ruang UKS	208	1.496	0.374
19	Memiliki ruang OSIS	211	1.518	0.379
20	Memiliki ruang KM/WC	223	1.604	0.401
21	Memiliki gudang	345	2.482	0.621
22	Memiliki ruang olahraga dll	348	2.504	0.626
23	Memiliki sirkulasi sesuai ketentuan	356	2.561	0.640
24	Memiliki kantin	351	2.525	0.631
25	Memiliki tempat parkir	218	1.568	0.392
26	Memiliki unit produksi	352	2.532	0.633
27	Memiliki bursa kerja	239	1.719	0.430
Jumlah				16,197

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel 5 tentang faktor standar sarana dan prasarana, menghasilkan bobot nilai akumulatif sebesar 16,197, dengan katagori sangat baik dan berpengaruh terhadap kebijakan sekolah, khususnya dalam mendukung proses kegiatan pembelajaran. Dari dua puluh tujuh komponen sebagai instrumen dalam komponen standar sarana dan prasarana, ketersediaan ruang Unit Kesehatan Sekolah, ruang OSIS dan ruang

parkir masih belum memenuhi kriteria standar yang ditetapkan.

6. Rekapitulasi Nilai Faktor Standar Pengelolaan

Faktor standar pengelolaan dari kebijakan sekolah terdiri dari lima belas item pertanyaan dengan bobot 10. Penilaian faktor standar pengelolaan dapat disajikan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 6. Rekapitulasi Nilai faktor Standar Pengelolaan

No	Komponen	Jumlah Skor Jawaban	Rata – rata Skor jawaban	Bobot Nilai
1	Memiliki visi, misi dan tujuan	352	2.532	0.633
2	Memiliki RKJM dan RKT	349	2.511	0.628
3	Memiliki pedoman pengelolaan	381	2.741	0.685
4	Memiliki struktur organisasi lengkap	359	2.583	0.646
5	Melaksanakan RKT	343	2.468	0.617
6	Melaksanakan kegiatan kesiswaaan	353	2.540	0.635
7	Melaksanakan pengelolaan kurikulum	346	2.489	0.622
8	Mendayagunakan tapendikep	208	1.496	0.374
9	Menilai kenerja tapendikep	211	1.518	0.379
10	Menyusun pedoman pengelolaan	223	1.604	0.401
11	Melibatkan peran serta masyarakat	345	2.482	0.621
12	Evaluasi diri dan kinerja sekolah	348	2.504	0.626
13	Melaksanakan tugas kepemimpinan	356	2.561	0.640
14	Menerapkan prinsip kepemimpinan	351	2.525	0.631
15	Memiliki sistem informasi manajemen	218	1.568	0.392
Jumlah				8.531

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel 6 tentang faktor standar pengelolaan, didukung oleh lima belas komponen, dengan nilai kumulaif yang dihasilkan sebesar 8,531, dengan katagori sangat baik dan berpengaruh bermakna terhadap kebijakan sekolah. Hal ini ditunjukan di dalam pengelolaan organisasi, penggunaan sistem informasi dan teknologi pada kegiatan belajar mengajar. Sedangkan komponen pendayagunaan tenaga pendidik dan

kependidikan masih kurang dibandingkan dengan program studi yang dibuka, sehingga berpengaruh terhadap komponen kinerja, khususnya kesesuaian beban kerja dengan kegiatan pembelajaran.

7. Rekapitulasi Nilai Faktor Standar Pembiayaan

Faktor standar pembiayaan dari kebijakan sekolah terdiri dari delapan belas item pertanyaan dengan bobot 10, dapat disajikan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 7. Rekapitulasi Nilai Komponen Standar Pembiayaan

No	Komponen	Jumlah Skor Jawaban	Rata – rata Skor jawaban	Bobot Nilai
1	Memiliki RKA	352	2.532	0.633
2	Memiliki RKA tiga tahun terakhir	349	2.511	0.628
3	Memiliki dokumen investasi	381	2.741	0.685
4	Biaya pengembangan tapendikkep	359	2.583	0.646
5	Merealisasikan modal kerja RKA	343	2.468	0.617
6	Laporan biaya tapendikkep	353	2.540	0.635
7	Merealisasikan biaya alat tulis	346	2.489	0.622

8	Merelisasikan biaya bahan	208	1.496	0.374
9	Merealisasikan biaya sarana & prasarana	211	1.518	0.379
10	Merealisasikan pengadaan daya & jasa	223	1.604	0.401
11	Merealisasikan biaya dinas	345	2.482	0.621
12	Merealisasikan biaya pembinaan	348	2.504	0.626
13	Merealisasikan biaya uji kompetensi	356	2.561	0.640
14	Merealisasikan biaya praktek	351	2.525	0.631
15	Merealisasikan biaya pelaporan	218	1.568	0.392
16	Sumbangan dana masyarakat/pemerintah	211	1.518	0.379
17	Memiliki sistem pembukuan	223	1.604	0.401
18	Memiliki laporan pertanggungjawaban	345	2.482	0.621
Jumlah				9,932

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel 7 tentang faktor standar pembiayaan yang teliti, nilai bobot akumulasi dihasilkan sebesar 9,932 dengan katagori sangat baik dan memiliki pengaruh bermakna terhadap kebijakan sekolah yang ditetapkan. Dari instrument standar pembiayaan, ada empat komponen instrument yang memiliki bobot nilai kurang bermakna terhadap kebijakan sekolah yaitu realisasi biaya bahan habis pakai untuk pelaksanaan kegiatan

pembelajaran, realisasi biaya sarana dan prasarana khususnya untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan, realisasi biaya pelaporan yang diakomodasi untuk tiga tahun terakhir dan realisasi dana sumbangan masyarakat dan pemerintah yang penyerapannya tidak sesuai kebijakan sekolah yang direncanakan.

8. Rekapitulasi Nilai Faktor Standar Penilaian

Tabel 8.Rekapitulasi Nilai Faktor Standar Penilaian

No	Komponen	Jumlah Skor Jawaban	Rata – rata Skor jawaban	Bobot Nilai
1	Sepuluh prinsip penilaian siswa	403	3.000	0.725
2	Kriteria ketuntasan minimal pelajaran	349	2.511	0.628
3	Siswa mengikuti berbagai ujian	381	2.741	0.685
4	Guru menilai sesuai kompetensi	359	2.583	0.646
5	Guru menilai sikap	343	2.468	0.617
6	Guru menilai kompetensi pengetahuan	353	2.540	0.635
7	Guru menilai kompetensi ketrampilan	346	2.489	0.622
8	Guru menilai melalui observasi	208	1.496	0.374
9	Guru menilai kompetensi tes tulis	211	1.518	0.379
10	Guru menilai ketrampilan melalui tes	359	2.583	0.646
11	Guru menilai dengan 8 langkah	343	2.468	0.617
12	Sekolah menentukan kelulusan	353	2.540	0.635
13	Sekolah melakukan pelaporan	346	2.489	0.622
Jumlah				7.831

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel 8 tentang faktor standar penilaian, akumulasi bobot nilai yang dihasilkan sebesar 7,831 yang menyatakan memiliki katagori sangat baik dan berpengaruh bermakna secara simultan terhadap kebijakan sekolah. Komponen penilaian melalui observasi dan tes tertulis sebagai metode atau katagori lain dalam memberikan penilaian obyektif kepada siswa masih kurang. Hal ini disebabkan

oleh kurangnya pendidik, dan bahan untuk menjalankan kegiatan penilaian tersebut.

Berdasarkan delapan komponen yang menjadi faktor dalam penilaian kebijakan sekolah, dilakukan perhitungan standar deviasi dan frekuensi untuk mengetahui kesesuaian penyebaran data serta validitas hasil keputusan terhadap penilaian kebijakan sekolah yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 9.Nilai Komponen Kebijakan Sekolah

No	Komponen	Jml Butir	Bobot Nilai	Std Nilai	Std fk	Hasil
1	2	3	4	5	6	
1	Standar Isi	9	10	7.630	6.128	Baik
2	Standar Proses	18	15	14.861	6.128	Sangat baik
3	Standar Kompetensi Kelulusan	7	12	6.013	6.128	Cukup baik
4	Standar Pendidik dan Tenaga Pendidik	18	16	14.610	6.128	Sangat baik
5	Standar Sarana dan Prasarana	27	17	16.197	6.128	Sangat baik
6	Standar Pengelolaan	15	10	8.531	6.128	baik
7	Standar Pembiayaan	18	10	9.932	6.128	Baik
8	Standar Penilaian	13	10	7.831	6.128	baik
Jumlah		125	100	85.605		

Sumber: data diolah, 2020

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SEKOLAH

Analisis faktor – faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas kebijakan sekolah dilakukan dengan mengkaji hasil penilaian faktor – faktor efektifitas kebijakan sekolah. Hasil uji normalitas data dengan sampel lebih dari 30 ($n > 30$), menunjukkan sebaran data berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis terhadap faktor – faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan sekolah dengan menggunakan uji – t dua arah. Dari tabel uji t dua arah menunjukkan bahwa kebijakan sekolah dipengaruhi secara signifikan oleh faktor standar isi, standar proses, standar

kompetensi kelulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan faktor standar penilaian. Selain melakukan uji hipotesis dilakukan juga analisis hubungan faktor – faktor terhadap kebijakan sekolah melalui uji deskriptif statistik kualitatif dan kuantitatif dengan ketentuan nilai signifikansi $<$ taraf signifikansi (α) sebesar 0,05. Hasil analisis dan interpretasi delapan faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Standar Isi

Dari tabel uji korelasi kualitatif dua arah, menunjukkan bahwa faktor standar isi menghasilkan nilai dengan signifikansi

sebesar $0,159 >$ taraf signifikansi (α) sebesar 0,05. Hasil uji ini menunjukkan bahwa faktor standar isi memiliki hubungan yang kurang signifikan terhadap kebijakan sekolah. Hal ini dapat dijelaskan dari komponen faktor standar isi yaitu pada instrument pengawasan dan pengembangan diri tenaga pendidik belum tercapai secara optimal dalam mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah secara efektif. Selain itu ditunjukkan pada hasil bobot nilai efektifitas kebijakan sekolah tabel 2.20 dengan hasil standar nilai $7,630 <$ dari standar bobot nilai yang ditetapkan.

Kemampuan pengembangan diri tenaga pendidik dan kependidikan tentunya akan berpengaruh terhadap pengembangan perangkat pembelajaran pada kompetensi pengetahuan siswa. Pengembangan perangkat pembelajaran pada faktor standar isi hanya mampu terpenuhi rata – rata sebesar 73,8% yang menyatakan pada katagori cukup baik terhadap kinerja yang mampu dicapai. SMK PGRI Klungkung sebagai sekolah kejuruan dengan program studi pariwisata dan tata boga, peningkatan kompetensi ketrampilan dan keahlian siswa didik sangat dibutuhkan. Guru sebagai tenaga pendidik dan kependidikan mampu melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran sesuai kompetensi ketrampilan dan keahlian siswa didik, dengan standar rata – rata sebesar 70 - 80% dengan katagori cukup baik.

Pengawasan terhadap pengembangan kurikulum dalam meningkatkan kompetensi pengetahuan siswa didik mampu tercapai dalam empat unsur kompetensi dalam kurikulum tingkat standar pendidikan yaitu konselor, pengawas sekolah, komite sekolah dan penyelenggara lembaga pendidikan. Sistem pengorganisasian dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan pelaksanaan proses pembelajaran melalui standar operasional prosedur pelaksanaan

pendidikan dapat tercapai secara optimal dengan tingkat pencapaian rata – rata sebesar 87,6% dengan katagori sangat baik. Secara keseluruhan faktor standar isi dalam pelaksanaannya mampu tercapai 85% dari efektifitas kebijakan sekolah yang ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor standar isi memiliki tingkat pencapaian yang sangat baik terhadap efektifitas kebijakan sekolah dalam meningkatkan kinerja pendidikan.

2. Faktor Standar Proses

Faktor standar proses secara menyeluruh memiliki hubungan yang bermakna terhadap efektifitas kebijakan sekolah dengan signifikansi sebesar $0,03 <$ taraf signifikansi (α) sebesar 0,05. Hal ini juga ditunjukkan dari hasil standar bobot nilai sebesar 14,861 yang mendekati standar bobot nilai yang ditetapkan. Faktor standar proses dilihat dari program keahlian pengembangan silabus tercapai dengan rata – rata bobot nilai sebesar 84%. Hal ini ditunjukkan program keahlian pengembangan silabus memenuhi delapan kriteria peningkatan yaitu dari aspek identitas pelajaran, kompetensi inti dan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, kelengkapan materi pembelajaran, cakupan kegiatan pembelajaran, metode penilaian, alokasi waktu dan sumber pembelajaran/bahan ajar.

Program keahlian pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran dari silabus mampu tercapai secara lengkap dan sistematis, dengan rata – rata bobot nilai sebesar 85,8%. Setiap kegiatan proses belajar mengajar yang didukung oleh sumber daya manusia/SDM sebagai pengelola kegiatan. Dalam pencapaian SDM untuk kompetensi program keahlian pelaksanaan pembelajaran dapat tercapai dengan rata – rata bobot nilai sebesar 86,5%. Hal ini ditunjukkan dengan

terpenuhinya kesesuaian jumlah guru/pendidik sesuai rasio siswa didik, kelengkapan buku dan modul pembelajaran, dan proses pembelajaran didukung dengan prasarana praktik dan laboratorium yang lengkap.

Faktor standar proses dilihat juga dari daya tampung siswa didik program keahlian dalam pelaksanaan pembelajaran dengan rata – rata bobot nilai sebesar 81,5% yang dijelaskan bahwa, jumlah siswa perrombongan belajar memiliki jumlah siswa 20 – 25 orang siswa < 32 orang standar maksimum yang ditetapkan, sehingga capaian kenyamanan belajar dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan ketersediaan buku pelajaran mampu tercapai dengan bobot nilai sebesar 82,9%. Kompetensi guru dan tingkat keprofesionalan guru dalam pengelolaan proses pembelajaran memiliki bobot nilai sebesar 85,9%. Kesiapan dan kesanggupan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran seperti mempersiapkan siswa didik secara fisik dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, pemberian motivasi belajar, serta penyampaian tujuan dan cakupan materi secara jelas dan sistematis menghasilkan bobot nilai sebesar 81,1%.

Dalam faktor standar proses, strategi pembelajaran, metode pembelajaran dan media pembelajaran yang menjadi sarana proses pembelajaran mampu tercapai dengan rata – rata nilai sebesar 89,7%, yang menunjukkan bahwa guru sebagai pendidik mampu memahami karakteristik dan kebutuhan siswa didik dalam proses pembelajaran. Guru juga memiliki kompetensi dalam mempersiapkan dan menyampaikan sumber pembelajaran berupa bahan ajar, dan metode pendekatan pembelajaran agar sesuai dengan peserta didik. Instrumen ini dapat tercapai dengan bobot nilai sebesar 80,6%. Metode pengawasan proses pembelajaran secara obyektif dan transfaran dalam

meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan memiliki rata – rata capaian sebesar 81,5%. Tindakan supervisi dan pemantauan proses pembelajaran mampu tercapai dengan bobot nilai sebesar 83,1%.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sistem penilaian dan evaluasi serta pelaporan menjadi salah satu komponen dari faktor standar proses kebijakan sekolah dengan bobot nilai capaian rata – rata sebesar 77,1%. Dari analisis diatas faktor standar proses dalam pelaksanaannya mampu tercapai dengan rata – rata bobot nilai sebesar 83,1%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor standar proses memiliki tingkat pencapaian yang sangat baik terhadap efektifitas kebijakan sekolah dalam meningkatkan kinerja pendidikan.

3. Faktor Standar Kompetensi Kelulusan

Faktor standar kompetensi kelulusan dengan signifikansi sebesar $0,06 >$ taraf signifikansi (α) sebesar 0,05 memiliki hubungan kurang signifikan terhadap kebijakan sekolah, hal ini dipengaruhi oleh komponen pada kompetensi sikap pembelajaran, tidak dapat mendukung secara optimal kebijakan sekolah yang ditetapkan. Dari faktor standar kompetensi kelulusan sebagai faktor standar kebijakan sekolah, dapat dilihat dari kompetensi siswa dalam keimanan dan ketaqwaan mampu dilaksanakan dengan bobot nilai sebesar 87,8%.

Dalam faktor standar kompetensi kelulusan siswa mampu menunjukkan sikap sosial dengan karakter bertanggungjawab dan kejujuran, sikap percaya diri, demokratis dan nasionalis dalam mengikuti proses pembelajaran dengan bobot nilai sebesar 88,8%. Siswa didik juga mampu menunjukkan sikap factual dan konseptual serta memiliki

ketrampilan berpikir kreatif, produktif dan kritis dengan bobot nilai capaian rata – rata sebesar 85,6%. Kompetensi standar kelulusan mampu dilaksanakan dalam ketrampilan siswa didik untuk bertindak secara mandiri, kolaboratif dan komunikatif dalam menampilkan kinerja mandiri dibawah pengawasan secara terukur dengan bobot nilai capai, rata – rata sebesar 88,3%. Secara keseluruhan komponen dalam faktor standar kompetensi kelulusan, mampu dilaksanakan sesuai kebijakan sekolah dengan bobot nilai rata – rata sebesar 86,3%.

4. Faktor Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Faktor tenaga pendidik dan kependidikan dengan signifikansi sebesar $0,110 > \text{taraf signifikansi } (\alpha)$ sebesar 0,05 memiliki hubungan yang kurang signifikan terhadap kebijakan sekolah. Hal ini disebabkan oleh kompetensi pengetahuan, ketrampilan dan keahlian yang dimiliki tenaga pendidik dan kependidikan tidak sesuai dengan keilmuan atau pengetahuan yang akan dikembangkan dalam sistem pembelajaran. Dilihat dari standar nilai pada faktor kebijakan sekolah menghasilkan standar nilai sebesar 14,610 mendekati dari standar nilai kompetensi yang ditetapkan.

Faktor standar tenaga pendidik dan kependidikan, 20% memiliki pendidikan S2 dan 80% memiliki kualifikasi pendidikan S1. Pimpinan sekolah sebagai penanggungjawab pengelolaan pendidikan memiliki syarat akademik drngan kualifikasi pendidikan S2 dan umur yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Pimpinan sekolah juga memiliki kemampuan manajerial dan kewirausahaan serta memiliki kemampuan supervisi dengan standar bobot nilai capain dalam pelaksanaan kebijakan sekolah sebesar 89,4%. Sebesar 87,1% guru

memiliki sertifikat pendidik dan sebanyak 81,3% guru memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga yang diakui, sehingga dapat dikatakan guru memiliki tingkat produktivitas yang cukup tinggi didalam pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran.

Pada standar pendidik, guru mata pelajaran memiliki kompetensi pedagogik sebesar 87,6% dan memiliki kompetensi professional dengan bobot nilai sebesar 75,1% dalam penguasaan materi, struktur dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu dan kemampuan dalam pengembangan materi pelajaran secara mandiri dan kreatif. Pendidik memiliki kompetensi kepribadian dan sikap sosial sesuai kebijakan sekolah yang ditetapkan dengan nilai capaian sebesar 86,7%. Dalam pengembangan sikap kepribadian siswa didik SMK PGRI Klungkung juga memiliki tenaga pendidik untuk bimbingan dan konseling dengan tingkat pendidikan S2 Bimbingan dan Konseling sesuai rasio atau jumlah siswa yang mengikuti proses pendidikan.

Selain tenaga pendidikan/guru, SMK PGRI Klungkung juga didukung oleh tenaga administrasi kependidikan dengan kualifikasi pendidikan S1, dan kepala perpustakaan dengan kualifikasi pendidikan S1 pendidikan. Disamping itu pada prasarana laboratorium bahasa, dikelola oleh guru yang memiliki kualifikasi pendidikan dan program keahlian setingkat S1. Tenaga kependidikan dalam bidang perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan memiliki kualifikasi pendidikan diploma dengan standar kompetensi bobot penilaian sebesar 83,1%. Dari analisis faktor standar tenaga pendidik dan kependidikan mampu dilaksanakan sesuai kebijakan sekolah dengan bobot nilai rata – rata sebesar 81,3%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor standar tenaga pendidik dan kependidikan memiliki

tingkat pencapaian yang sangat baik terhadap efektifitas kebijakan sekolah dalam meningkatkan kinerja pendidikan.

5. Faktor Standar Sarana dan Prasarana

Faktor standar sarana dan prasarana, sebagai penunjang dan pendukung kegiatan proses pembelajaran menjadi salah satu faktor yang penting pada kebijakan sekolah untuk dapat membantu mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, dari deskripsi statistik kualitatif, faktor sarana dan prasarana menunjukkan signifikansi sebesar $0,001 < \alpha$ sebesar 0,05 yang menyatakan memiliki hubungan yang sangat signifikan dan berpengaruh terhadap kebijakan sekolah.

Jika dilihat dari ketersediaan ruang pembelajar umum, ruang penunjang kegiatan siswa, ruang pembelajar khusus, ruang kelas, ruang laboratorium bahasa, ruang praktek tata boga dan ruang perpustakaan mampu terpenuhi dengan kriteria bobot nilai rata – rata sebesar 64,3% dari standar kebijakan sekolah yang ditetapkan. Sedangkan ruang kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang bimbingan dan konseling, ruang perpustakaan serta ruang administrasi kepegawaian dan kependidikan mampu terpenuhi dengan kriteria bobot nilai rata – rata sebesar 77,4% sesuai kriteria standar sarana dan prasarana pada kebijakan sekolah.

Sekolah Menengah Kejuruan/SMK PGRI Klungkung didukung oleh beberapa unit produksi dan bursa kerja sesuai bidang keahlian yang dijalankan. Unit produksi yang dikembangkan dalam program keahlian adalah tata boga, tata niaga dan perhotelan dengan kriteria bobot nilai capaian sebesar 78,7%. Secara keseluruhan komponen faktor sarana dan prasarana mampu mendukung pelaksanaan kebijakan

sekolah dengan rata – rata nilai sebesar 70%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor standar sarana dan prasarana memiliki tingkat pencapaian yang sangat baik dan berpengaruh terhadap efektifitas kebijakan sekolah dalam meningkatkan kinerja pendidikan.

6. Faktor Standar Pengelolaan

Faktor standar pengelolaan, yang berisikan tentang visi, misi dan tujuan pendidikan yang dilengkapi dengan Rencana Kerja Jangka Menengah/RKJM dan Rencana Kerja Tahunan/RKT serta dilengkapi struktur organisasi kerja dan pedoman pengelolaan sekolah, menunjukkan signifikansi sebesar $0,001 < \alpha$ sebesar 0,05 yang menyatakan memiliki hubungan yang sangat signifikan dan berpengaruh terhadap kebijakan sekolah.

Faktor standar pengelolaan berdasarkan komponen pelaksanaan kegiatan kesiswaan dan pengelolaan mampu mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah dengan kriteria bobot nilai sebesar 76,4%. Sedangkan untuk pendayagunaan dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan dalam kurun waktu jangka menengah menghasilkan relevansi bobot nilai sebesar 72,2%. Standar pengelolaan berdasarkan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja pendidik dan kependidikan serta menyusunnya dalam bentuk pedoman pengelolaan pengembangan pendidikan tercapai dengan kriteria bobot nilai sebesar 79,0%.

Sistem informasi melalui dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi pengelolaan pendidikan mampu dilaksanakan dengan bobot nilai sebesar 76,2%. Untuk sistem pelaporan yang mengedepankan aspek kepemimpinan dalam pelaksanaan tugas dan penerapan prinsip pengelolaan mampu mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah sebesar

73,9%. Secara keseluruhan komponen faktor standar pengelolaan mampu mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah dengan rata – rata nilai sebesar 75,8%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor standar pengelolaan memiliki tingkat pencapaian yang sangat baik dan berpengaruh terhadap efektifitas kebijakan sekolah dalam meningkatkan kinerja pendidikan.

7. Faktor Standar Pembiayaan

Faktor standar pembiayaan yang memiliki Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA untuk pembiayaan seluruh proses kegiatan pembelajaran dan pengembangan, serta rencana pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan, menunjukkan signifikansi sebesar $0,001 < \alpha$ sebesar 0,05 yang menyatakan bahwa faktor standar pembiayaan memiliki hubungan dan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan sekolah.

Rencana Kerja dan Anggaran selama tiga tahun terakhir dapat terealisasi sebesar 67,3% dari ketentuan kebijakan sekolah yang ditetapkan.

Dalam perkembangannya realisasi pembiayaan sarana dan prasarana yang habis pakai hanya mampu terlaksana 59,8%, hal ini disebabkan metode perencanaan dan pengalokasian yang sesuai dengan kebutuhan. Pembiayaan untuk perjalanan dinas, baik itu keikutsertaan guru dalam peningkatan keterampilan dan keahlian melalui seminar, tugas belajar dan pertemuan ilmiah lainnya masih kurang terpenuhi secara optimal. Realisasi anggaran yang mampu diserap sebesar 64,5%.

Rencana anggaran pembiayaan terhadap siswa melalui biaya pembinaan, uji kompetensi dan kegiatan praktik dalam mendukung kebijakan sekolah, mampu terlaksana dengan nilai bobot sebesar

76,4%. Hal ini dapat dilihat dari kurikulum kegiatan siswa pada bidang keahlian yang menuntut siswa didik harus mengikuti kegiatan kompetensi keahlian dan ketrampilan pada akhir setiap semester. Untuk realisasi pembiayaan pelaporan evaluasi dan penilaian kinerja pendidikan, dapat terlaksana dengan bobot nilai 78,6%. Sumbangan masyarakat dan pemerintah dalam kegiatan pembelajaran dapat terserap sebesar 73%, hal ini menunjukkan tingkat keatifitas kemandirian serta kelompok siswa dalam menyusun kegiatan belajar dapat terealisasi dengan baik.

Faktor standar pembiayaan tidak terlepas dari sistem pelaporan yang merupakan bentuk tanggungjawab didalam mengembangkan visi dan misi pendidikan. Realisasi sistem pembukuan/ART dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendidikan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah sebesar 76,2%. Secara keseluruhan komponen faktor standar pembiayaan mampu mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah dengan rata – rata nilai sebesar 75,5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor standar pembiayaan memiliki tingkat pencapaian yang sangat baik dan berpengaruh terhadap efektifitas kebijakan sekolah dalam meningkatkan kinerja pendidikan.

8. Faktor Standar Penilaian

Faktor standar penilaian, dengan komponen prinsip penilaian siswa, ketuntasan minimal pelajaran, sistem penilaian oleh guru dan penentuan kelulusan dari sekolah, menunjukkan signifikansi sebesar $0,001 < \alpha$ sebesar 0,05 memiliki hubungan dan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan sekolah. Kompetensi penilaian siswa dengan didasarkan pada prinsip kesahihan, obyektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan,

sistematis, akuntabel dan andal memiliki kesesuaian dan relevansi nilai sebesar 82,7%. Sekolah mampu menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal/KKM seluruh mata pelajaran mampu tercapai dengan bobot nilai sebesar 72,8%, hal ini didasarkan kepada aspek karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, kondisi satuan pendidikan dan metode analisis hasil pembelajaran.

Dari jumlah peserta didik yang terdaftar mengikuti proses pendidikan di SNK PGRI Klungkung, keseluruhan siswa mampu mengikuti ujian kompetensi yang ditetapkan dengan kriteria relevansi bobot nilai sebesar 83,4% terhadap kriteria ulangan, ujian sekolah, ujian nasional, ujian unit kompetensi dan ujian kompetensi keahlian. Ketentuan KKM peserta didik ditentukan oleh guru yang mengampu masing – masing mata pelajaran. Sehingga berdasarkan faktor standar penilaian, guru melakukan penilaian sesuai kompetensi pengetahuan sebesar 74,8%, guru melaksanakan penilaian kompetensi sikap dan kompetensi pengetahuan siswa sesuai Kompetensi Kemampuan Dasar/KKD sebesar 76,3%.

Pelaksanaan penilaian oleh guru berdasarkan kompetensi ketrampilan dan keahlian serta sikap melalui metode observasi dan teknik pengetahuan lain, hanya mampu memiliki bobot nilai sebesar 63,7%. Disamping itu dalam proses pembelajaran guru juga diberikan kewajiban untuk melaksanakan kompetensi pengetahuan peserta didik melalui tes lisan, tertulis dan tugas yang tecapai dengan bobot nilai 67,1%. Metode uji kompetensi pengetahuan siswa ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat perkembangan kognitif, afektif dan psikomorik siswa sehingga siswa didik memiliki tanggungjawab dan kemandirian serta kemampuan inovasi yang kreatif dalam penyelesaian pendidikan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang terpenting adalah guru mampu melakukan proses penilaian terhadap siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Tahapan penilaian ini dilakukan oleh guru melalui delapan kriteria yaitu menetapkan tujuan dari penilaian, menyusun kisi – kisi tujuan pembelajaran, mengembangkan instrument dan pedoman penilaian, melakukan penilaian kualitas instrument, menguji kompetensi penilaian, mengolah dan menyusun keputusan kelulusan siswa, menyusun pelaporan pembelajaran, penilaian dan evaluasi serta mampu memnfatakan hasil nilai. Hal ini yang belum dapat tercapai secara optimal dalam mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah dan hanya mampu tercapai dengan bobot nilai sebesar 63,7%.

Faktor standar penilaian lainnya yang menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal dari peserta didik adalah keterlibatan sekolah menentukan kriteria kelulusan siswa melalui rapat kurikulum, penilaian dan evaluasi. Di SMK PGRI Klungkung keterlibatan sekolah melalui rapat para guru dan pimpinan sekolah dalam menentukan standar penilaian kelulusan siswa didik sering dilakukan dan hal ini memiliki relevansi bobot nilai sebesar 73,8% yang menunjukkan bahwa pihak sekolah melalui pemegang keputusan/kepala sekolah mampu melaksanakan kriteria kebijakan sekolah yang ditetapkan. Secara keseluruhan komponen faktor standar penilaian mampu mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah dengan rata – rata nilai sebesar 72,5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor standar penilaian memiliki tingkat pencapaian yang sangat baik dan berpengaruh terhadap efektifitas kebijakan sekolah dalam meningkatkan kinerja pendidikan.

Berdasarkan analisis di atas, peneliti berpendapat bahwa Analisis kebijakan

merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan dalam proses pembuatan kebijakanAnalisis kebijakan sekolah memungkinkan tersedianya panduan yang komprehensif bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Hal ini disebabkan analisis kebijakan juga mencakup dua hal pokok yaitu hal-hal yang bersifat substansial saat ini dan hal-hal strategik yang mungkin akan terjadi ada masa yang akan datang.Sebuah kebijakan harus ditetapkan secara sistemik, holistic dan interdisipliner serta melibatkan seluruh pihak/partisipatori sehingga keberdayagunaan seluruh faktor kebijakan dapat didukung oleh kesiapan sumber daya yang sesuai dan memadai.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan efektifitas kebijakan sekolah dalam peningkatan kinerja pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat delapan faktor yang teridentifikasi mempengaruhi efektifitas kebijakan sekolah di SMK PGRI Klungkung yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian memiliki relevansi hubungan yang sangat bermakna. Disamping itu terdapat lima faktor yang mendukung kebijakan sekolah secara optimal dan memiliki pengaruh yang sangat baik terhadap pelaksanaan kebijakan sekolah yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.

B. Saran-saran

Berdasarkan simpulan di atas dapat disarankan dari kriteria perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sekolah sebagai berikut:

1. Kebijakan sekolah hendaknya mampu mengakomodir kebutuhan – kebutuhan tenaga pendidik, kependidikan dan masyarakat sebagai argumentasi isu/ masukan dalam standar proses sebagai bentuk pendekatan evaluatif untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan sekolah secara efektif dan efisien.
2. Adanya keterbatasan waktu dan biaya penelitian, diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian dan analisis terhadap efektifitas kebijakan sekolah untuk dapat mengkaji kebijakan sekolah melalui pendekatan statistik kuantitatif eksperimental/ *experimental quantitative statistical approach* sehingga diperoleh sudut pandang dan bentuk isu kebijakan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alit A. 2014. Penelitian Kualitatif. *Sistem Kerja, Keluhan Beban Kerja Melalui Pendekatan Sistemik, Holistic, Interdisipliner dan Partisipatori*. Jurnal Akses Vol 2. Oktober 2016.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru Buku 2: Pedoman Pelaksanaan Kinerja Guru*.
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Terjemahan Samodra Wibawa dkk. Gajah Mada University Press.
- Dunn, William N., 2003 *Analisa Kebijakan Publik*. (Peny.: Muhamd Darwir). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dunn, William. N., 2015. *Public policy analysis*. Routledge; 711 Third Avenue, New York USA
- Imron , Ali. 1995. *Kebijakan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara

- O'Neil, Harold F, Jr., and Drillings, Michael. 1994. *Motivation: Theory and Research*. New York & London: Routledge.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009. *Tentang Pendidikan Menengah*.
- Riduan. 2013. *Teori Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, P Sondang. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan kesepuluh, Jakarta: Bumi Aksara.
- Syaiful, Sagala. 2000. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: CV Alfabeta
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.